



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE
DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Noor Hikmah
Chairina
Desilarina Rahmayanti**

(Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)

Abstract

This research aims to test and to prove empirically factors which affect the level of corporate governance disclosure in annual report of banking companies listed in Indonesian Stock Exchange. The factors tested in this research are company size, firm listing age, dispersed ownership, profitability, and size of commissioner board.

Population of this research is banking companies listed in Indonesian Stock Exchange during 2007 until 2009. There have been 19 companies selected as the sample of this research by using purposive sampling method. There are 126 disclosure items to detect the level of corporate governance disclosure which include mandatory and voluntary disclosure. The technique for examining hypothesis is multiple regression analysis by SPSS 16.0 program. It uses F-test to examine simultaneously and t-test to examine partially.

The results indicate that company size, firm listing age, dispersed ownership, profitability and size of commissioner simultaneously affect corporate governance disclosure. Partially, company size and size of commissioner board have positive significant influence on corporate governance disclosure, and firm listing age has a significant negative influence to corporate governance disclosure. Dispersed ownership and profitability have insignificant influence to corporate governance disclosure. Adjusted R^2 is 0,521 which means that 52,1% variety of corporate governance disclosure can be explained by variety of the five independent variables: total asset, firm listing age, dispersed ownership, profitability, and size of commissioner board. The rest, 47,9% can be explained by other factors unexamined in this research.

Keywords : *Corporate Governance, Annual Report, Corporate Governance disclosure, Banking Companies.*



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

I. PENDAHULUAN

Laporan tahunan adalah media yang digunakan oleh perusahaan yang *go public* untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak luar manajemen. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, karyawan, kreditor, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya bergantung pada pelaporan dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan untuk membuat keputusan. Cadbury (2000) dalam Bhuiyan dan Biswas (2007:2) menjelaskan pentingnya pengungkapan *corporate governance*. Pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan transparan dapat menambah nilai bagi para *stakeholders*. Jika tidak ada pengungkapan yang memadai, para *stakeholder* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka.

Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* muncul setelah terjadinya krisis multidimensi pada pertengahan 1997. Krisis ini dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kemudian menghancurkan sendi-sendi ekonomi, salah satunya adalah pada sektor perbankan. Menurut hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB (*Asia Development Bank*), krisis yang terjadi di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar dunia adalah disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan *good corporate governance* (Husein,2010). Sebagai bukti pada tahun 2007 *Asian Corporate Governance Association*, CLSA *Asia-Pacific Markets* menempatkan Indonesia pada urutan kesebelas (terbawah) di Asia. Hal



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

lain terkait GCG adalah rendahnya transparansi di lingkungan bisnis Indonesia. Djalil (2000:4) mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 1999 di mana indeks transparansi lingkungan bisnis menunjukkan bahwa lingkungan bisnis di Indonesia relatif tidak transparan. Berkembangnya isu tranparansi dalam *corporate governance* akan mendorong adanya peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek *corporate governance* suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, pemerintah, dan penyusun standar.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) telah mempublikasikan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* pada tahun 2006 sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance*, termasuk rekomendasi mengenai pengungkapan praktik *good governance*. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Labelle dalam Kusumawati (2006) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan praktik *corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

mempengaruhi pengungkapan praktik *corporate governance* kemungkinan tidak sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *financial disclosure*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate governance*, yaitu faktor karakteristik spesifik perusahaan dan faktor *corporate governance* itu sendiri. Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, umur *listing*, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Pemilihan sektor perbankan sebagai sampel dikarenakan karakteristik industri perbankan yang berbeda dengan industri lainnya. Sektor ini sangat erat kaitannya dengan *good corporate governance* karena adanya regulasi, selain dari BAPEPAM tentang penyampaian laporan tahunan yang memuat laporan tata kelola perusahaan, sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada *stakeholder* tentang pelaksanaan *good corporate governance* dan kesimpulan umum hasil *self assesment* pelaksanaan *good*



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

corporate governance, sehingga pengungkapan *corporate governance* menjadi sangat penting. Selain itu, industri perbankan adalah industri yang berbasis kepercayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan investor tentunya bank perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Salah satunya adalah dengan pengungkapan *corporate governance*.

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) erat hubungannya dengan *corporate governance*. Teori ini adalah dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance* (Rini, 2010:11). Teori keagenan membahas hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama *principal* tersebut. Hal ini menjadi dasar perlunya manajemen melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Hak yang dimiliki manajer untuk mengelola aset perusahaan, menimbulkan adanya konflik kepentingan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

antara dua kelompok. Teori keagenan mengasumsikan, dalam pasar modal dan tenaga kerja yang tidak sempurna, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri, dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Agen memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan terbaik perusahaan disebabkan oleh informasi yang bersifat asimetris. Konflik antara agen dan prinsipal dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (agen). Di samping untuk mengurangi informasi yang asimetris, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh manajemen. Sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance* yang di dalamnya terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan.

2.2. Corporate Governance dan Perusahaan Perbankan di Indonesia

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan kebijakan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik (OECD, 1999). KNKG dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 mengidentifikasi asas-asas yang melandasi penerapan *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Industri perbankan Indonesia memiliki setidaknya tiga dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan GCG bagi bank umum, yaitu *Enhancing Corporate Governance for Banking Organization* (yang diterbitkan *Basel Committee* tahun 2006) yang bersifat imperatif secara moral karena Bank Indonesia adalah salah satu bank sentral yang tergabung di dalamnya, Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang diterbitkan KNKCG pada tahun 2004 bersifat tidak mengikat dan tidak imperatif namun bermanfaat untuk dijadikan acuan sukarela karena sifatnya yang lebih komprehensif, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum (PBI-2006) yang bersifat mengikat secara hukum (Abdullah, 2010:70).

2.3. Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance* karena laporan tahunan berisi tentang berbagai macam informasi mengenai perusahaan termasuk praktik *good corporate governance* (Rini, 2010:17). Pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan tidak terbatas pada



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

pengungkapan yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga pengungkapan di luar persyaratan minimal dianggap sebagai pengungkapan sukarela.

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-134/BL/2006. Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyampaian laporan tahunan serta bentuk dan isinya. Dari sekian banyak informasi yang wajib disampaikan dalam laporan tahunan, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam periode laporan keuangan terakhir.

Dalam penelitian ini, *item* pengungkapan yang digunakan berasal dari pengungkapan wajib yang diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 dan yang diperoleh dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006) seperti pada penelitian Rini (2010). Peneliti juga menambahkan rincian pengungkapan dari PBI-2006, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia dari KNKCG tahun 2004, dan *Enhancing Corporate Governance for Banking Organization* dari *Basel Committee* tahun 2006 karena sektor yang diteliti kali ini adalah lebih khusus yaitu sektor perbankan. Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 16 indikator pengungkapan yang terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite audit; komite nominasi dan remunerasi; komite manajemen risiko; komite-komite lain yang dimiliki perusahaan; sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; manajemen



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

risiko perusahaan; perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; kegiatan sosial dan politik; pernyataan penerapan *good corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Enam belas indikator tersebut memuat *item* pengungkapan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

2.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*

Variabel ukuran perusahaan adalah variabel yang sering diteliti dalam hubungannya dengan luas pengungkapan. Hasilnya pun cukup konsisten berpengaruh terhadap luas pengungkapan (misalnya: Sutomo (2004); Bhuiyan dan Biswas (2007); Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007); Benardi K., Sutrisno, dan Assih (2009); Ariny (2010); Rini (2010)). Pengaruh ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan dapat dijelaskan melalui teori agensi di mana dinyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam upaya mengurangi biaya keagenan.

Terdapat beberapa argumentasi yang mendasar hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan. Pertama, perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung memiliki sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Kedua, perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage* (Almilia, 2008:120).

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga variabel ini digunakan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aset, maka semakin banyak modal yang ditanamkan. Semakin besar penjualan, maka semakin banyak perputaran uang dan kapitalisasi pasar. Dari ketiga variabel ini, nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007:A54).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.5. Pengaruh Umur *Listing* Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*

Semakin lama umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis (*survive*) di tengah persaingan bisnis dan situasi persaingan yang mengglobal dan berpengalaman dalam melakukan pengungkapan dari tahun ke



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

tahun (Sutomo, 2004:7). Dengan umur yang lebih lama, perusahaan diperkirakan akan meningkatkan praktik pengungkapannya karena dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya dan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi yang berkepentingan terhadap perusahaan (Singhvi dan Desai (1971), Djoko Susanto (1992), Wallace et. al. (1994) dalam Yularto dan Chariri, 2003:5).

Yularto dan Chariri (2003) melakukan penelitian dengan membandingkan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebelum krisis dan pada periode krisis. Salah satu variabel yang digunakan adalah umur *listing*. Hasil penelitian tahun 1996 menunjukkan bahwa umur *listing* berpengaruh terhadap luas pengungkapan dengan tingkat signifikansi 10%, sedangkan pada tahun 1997 dan 1998 tidak berpengaruh.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Umur *listing* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.6. Pengaruh Kepemilikan Dispersi Terhadap Pengungkapan Corporate Governance

Masalah *corporate governance* muncul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Kepemilikan dispersi dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya $\leq 5\%$ (Kusumawati, 2006:10).

Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena pihak manajemen mempunyai akses informasi yang luas tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan atau manajemen sengaja menahan informasi untuk menghindari adanya pemanfaatan informasi yang diungkapkan oleh para pesaing perusahaan. Semakin menyebar kepemilikan saham, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan karena adanya keinginan publik untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat ia berinvestasi dan untuk mengawasi tindakan manajemen (Sutomo, 2004:32; Nuryaman, 2009:105). Di samping itu, pengungkapan yang luas juga merupakan bentuk usaha pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (Haniffa (2003) dan Mohd (2005) dalam Nuryaman, 2009:93). Teori agensi menyatakan bahwa pengungkapan akan lebih luas pada perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih menyebar (Haniffa dan Cooke (2002) dalam Kusumawati, 2006:7).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Capital markets transactions hypothesis (Haely dan Palepu 2000) menghipotesiskan bahwa ketika manajemen/pemegang saham pengendali perusahaan berada pada posisi *superior information*, maka akan menimbulkan asimetri informasi antara pemegang saham pengendali/manajemen dengan pemegang saham minoritas. Tingginya asimetri informasi akan meningkatkan biaya modal sehingga akan menurunkan harga saham perusahaan tersebut, oleh karena itu pemegang saham pengendali harus menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dengan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi guna mengurangi asimetri informasi (Nuryaman, 2009:93).

Khomsiyah (2003) melakukan analisis korelasi sederhana dalam meneliti hubungan antara implementasi *corporate governance* dengan tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Penelitian ini membuktikan bahwa struktur kepemilikan publik mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks *corporate governance* dan pengungkapan informasi. Penelitian Nuryaman (2009) yang menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela juga menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh publik berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan pada tingkat signifikansi 0,1. Jadi, semakin terdispersinya kepemilikan saham maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Tuntutan publik atas transparansi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam laporan tahunan juga semakin besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.7. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Governance

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada. Profitabilitas adalah variabel yang secara luas diteliti dalam banyak penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan (misalnya: Kusumawati (2006); Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007); Sudarmadji dan Sularto (2007); Benardi K., Sutrisno, dan Assih (2009); Ariny (2010)). Shingvi dan Desai (1971) dalam Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007:92) mengidentifikasi *profit margin* dan *earning return* sebagai variabel yang berhubungan secara positif dalam variasi yang ditentukan dalam luas pengungkapan perusahaan dengan alasan *earning* yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih banyak. Manajer ingin meyakinkan kepada pemilik atau investor tentang profitabilitas yang dicapai perusahaan agar mereka meningkatkan kompensasi untuk manajemen, untuk itu pihak manajemen melakukan pengungkapan yang lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, profitabilitas diukur menggunakan rasio *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank. Dalam penelitian ini,



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

profitabilitas diukur menggunakan rasio *return on equity* (ROE). Pemilihan rasio ini berdasarkan argumen bahwa adanya *corporate governance* dimaksudkan terutama untuk kepentingan pemegang saham (Jackson dan Carter (2005) dalam Kusumawati, 2006:9). Fokus kepada pemegang saham ini juga secara eksplisit dinyatakan dalam Pedoman Umum *Corporate Governance*, yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya (KNKG, 2006:2).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis keempat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.8. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris (KNKG, 2006:13).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen karena perilaku oportunistiknya. Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

(2005:72) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan *corporate governance*, maka dengan adanya tekanan terhadap manajemen, pengungkapan *corporate governance* akan semakin luas.

Sembiring (2005) melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah ukuran dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini mendukung hasil penelitian Arifin (2002) dalam Sembiring (2005:78) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

3. METODE RISET

3.1. Sampel dan Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007, 2008, dan 2009. Jumlah populasi sampai tahun 2009 sebanyak 29 perusahaan. Berdasarkan populasi tersebut dapat ditentukan sampel penelitian. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

kriteria sebagai berikut: (i) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 s.d. 2009, (ii) laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan per 31 Desember tahun 2007, 2008, dan 2009 tersedia secara berturut-turut di situs resmi Bursa Efek Indonesia, (iii) total ekuitas dan laba bersih sebelum pajak tidak bernilai negatif. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan.

3.2. Identifikasi dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan yang diukur dengan indeks pengungkapan *corporate governance* sebagai standar untuk mengukur tingkat pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Bhuiyan dan Biswas, 2007; Rini, 2010):

$$IPCG = \frac{\text{Total item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang mungkin diperoleh perusahaan}} \times 100\%$$



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

2. Variabel Independen

a. Ukuran Perusahaan (*Total Asset*)

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aset perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007; Ariny, 2010; Rini, 2010). Total aset kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma natural. $Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Asset$

b. Umur *listing* perusahaan

Variabel umur *listing* diukur menggunakan selisih tahun pada laporan tahunan dengan tahun perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bhuiyan dan Biswas, 2007).

c. Kepemilikan dispersi

Variabel kepemilikan dispersi diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang kepemilikannya $\leq 5\%$ (Kusumawati, 2006).

d. Profitabilitas

Profitabilitas diproksi dengan *return on equity* (ROE). ROE dapat dihitung dengan rumus:

$$Return\ on\ equity\ (ROE) = \frac{Laba\ bersih\ sebelum\ pajak}{Totalekuitas} \times 100\%$$



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

e. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan, yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris (Rini, 2010).

3. Data

Data yang diperlukan adalah data sekunder yang meliputi laporan tahunan perusahaan perbankan, total aset tanggal *listing*, kepemilikan dispersi, ROE, dan jumlah dewan komisaris selama periode 2007 s.d. 2009. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu <http://www.idx.co.id/> dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance* adalah analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$\ln \text{IPCG} = a + b_1 \ln \text{TA} + b_2 \ln \text{UL} + b_3 \ln \text{KD} + b_4 \ln \text{ROE} + b_5 \ln \text{UDK} + e$$

Keterangan:

IPCG=Indeks pengungkapan *corporate governance*

TA= Total aset

UL= Umur *listing*

KD= Kepemilikan dispersi



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

ROE = *Return on equity*

UDK = *Ukuran Dewan Komisaris*

e = *Standar eror*

5. ANALISIS DATA

5.1. Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan *Normal P-P Plot*, grafik histogram, dan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan *p-value* = 0,852 berada di atas 5%. Uji multikolinearitas diperoleh nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 pada setiap variabel. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji grafik menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Pengujian autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* sebesar 2,028, angka ini berada pada daerah tidak terjadinya autokorelasi ($du < DW < 4-du$). Berdasarkan pengujian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat asumsi klasik telah terpenuhi.

5.2. Pengujian Model Regresi dan Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji ANOVA atau uji F dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur *listing*, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dibuktikan oleh nilai F dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Hasil uji F ini juga menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, umur



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

listing, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Nilai *adjusted R*² sebesar 0,521 menunjukkan bahwa 52,1% variasi dari IPCG bisa dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen yaitu total aset, umur *listing*, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris.

5.3. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut ini ringkasan hasil pengujian hipotesis:

Tabel 1
Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Koefisien	t-statistik	Nilai p
H ₁	Ukuran perusahaan	0,056	2,361	0,022
H ₂	Umur <i>listing</i>	-0,089	-2,933	0,005
H ₃	Kepemilikan	0,026	0,831	0,410
H ₄	dispersi	-0,011	-0,296	0,769
H ₅	Profitabilitas	0,352	4,122	0,000
	Ukuran dewan komisaris			

6. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

6.1. PEMBAHASAN

Hipotesis Pertama

Pada tabel 1 terlihat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,022 ($p < 0,05$) dan arah pengaruhnya positif. Hasil pengujian hipotesis ini konsisten dengan penelitian Sutomo (2004), Andersson dan Daoud (2005), Kusumawati (2006), Bhuiyan dan Biswas (2007), Benardi K.,



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Sutrisno, dan Assih (2009), dan Rini (2010) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan, tetapi tidak mendukung hasil penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) dan Khomsiyah (2003). Penelitian yang dilakukan Rahmawati, Mutmainah dan Haryanto (2007) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib. Ariny (2010) dalam penelitiannya menguji pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela dan membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Kedua penelitian tersebut konsisten karena pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan meliputi pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Semakin besar perusahaan maka pengungkapan oleh pihak manajemen akan semakin luas untuk mengurangi biaya keagenan. Alasan lain luasnya pengungkap

- a. Perusahaan dengan aset besar memiliki sumber daya untuk menghasilkan pelaporan yang lebih baik dan lebih banyak informasi.
- b. Biaya rata-rata untuk menghasilkan informasi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan.
- c. Sorotan dan tekanan publik pada perusahaan besar lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi sebagai bentuk akuntabilitasnya sehingga akan lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

d. *Competitive disadvantage* bagi perusahaan kecil yang umumnya berada pada situasi persaingan ketat dengan perusahaan lain. Jika mengungkapkan informasi yang terlalu banyak kepada pihak eksternal, maka dapat membahayakan posisinya dalam persaingan sehingga mereka cenderung melakukan pengungkapan yang lebih sempit dibanding perusahaan besar (Yularto dan Chariri, 2003:5; Almilialia, 2008:120).

Hipotesis Kedua

Pada tabel 1 terlihat bahwa umur *listing* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* yang ditunjukkan *p-value* sebesar 0,005 ($p < 0,05$) yang artinya hipotesis penelitian kedua diterima. Koefisien regresi dari umur *listing* mempunyai nilai negatif sebesar -0,089 menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan luas pengungkapan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007) dan Rini (2010). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur *listing* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Penelitian ini mendukung penelitian Yularto dan Chariri (2003) yang menunjukkan bahwa umur *listing* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan. Tetapi, terdapat perbedaan pada arah hubungan antar variabel. Penelitian terdahulu menunjukkan arah hubungan positif, sedangkan pada penelitian ini menunjukkan arah hubungan negatif.

Hubungan negatif yang ditunjukkan koefisien variabel umur *listing* memang terlihat berlawanan dengan teori yang dikemukakan Singhvi dan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Desai (1971), Djoko Susanto (1992), Wallace *et. al.* (1994) dalam Yularto dan Chariri (2003) bahwa semakin lama umur perusahaan akan lebih berpengalaman dalam pengungkapan dan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi sehingga akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan data variabel penelitian dan tahun mulai beroperasinya perusahaan, ternyata terdapat banyak perusahaan dengan nilai umur *listing* yang besar melakukan pengungkapan *corporate governance* secara sempit, sedangkan perusahaan dengan nilai umur *listing* yang kecil melakukan pengungkapan *corporate governance* secara lebih luas. Misalnya IPCG pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan umur *listing* 6 mempunyai IPCG sebesar 75,40%, sedangkan PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan nilai umur *listing* yang jauh lebih besar yaitu 27 mempunyai IPCG sebesar 42,86%. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi bernilai negatif yang artinya terdapat hubungan yang berlawanan arah antara umur *listing* dengan pengungkapan *corporate governance*. Namun, jika dilihat dari umur operasi perusahaan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah berumur lama (didirikan tahun 1968) dan memiliki banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunan memiliki nilai IPCG yang cukup tinggi sehingga jika dilihat dari umur operasi perusahaan tidak bertentangan dengan teori.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Hipotesis Ketiga

Pada tabel 1 terlihat bahwa kepemilikan dispersi tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,410 ($p > 0,05$). Hasil ini tidak mendukung hipotesis penelitian ketiga yang menyatakan bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Andersson dan Daoud (2005) dan Rini (2010) bahwa kepemilikan dispersi tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian Kusumawati (2006) bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance* dan Teori Agensi (Haniffa dan Cooke (2002) dalam Kusumawati, 2006:7).

Berdasarkan hasil statistik deskriptif (Lampiran 3) dapat dilihat bahwa rata-rata kepemilikan dispersi perusahaan perbankan adalah 24,19. Jumlah ini cukup kecil sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia masih mengarah pada pola kepemilikan terkonsentrasi di mana para manajer menjadi kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas. Pihak non-pengendali menjadi kurang kuat untuk menekan pihak manajemen agar melakukan pengungkapan yang lebih luas (Bernardi K, Sutrisno, dan Assih, 2009:18).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Hipotesis Keempat

Pada tabel 1 terlihat bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,769 ($p > 0,05$). Hasil ini tidak mendukung hipotesis penelitian keempat yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007) yang menguji pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan wajib dan Ariny (2010) yang menguji pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi luas pengungkapan. Begitu pula halnya dengan Almilialia (2008) menguji pengaruh profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE) terhadap luas pengungkapan dan hasilnya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini tidak tidak konsisten dengan penelitian Kusumawati (2006) di mana profitabilitas berpengaruh signifikan secara marginal pada *p-value* 0,065 terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap indeks luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan dikarenakan profitabilitas yang merupakan salah satu cermin kinerja perusahaan adalah suatu keharusan yang akan memudahkan perusahaan menjalankan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

operasionalnya sehari-hari (Bernardi K., Sutrisno, dan Assih, 2009). Kusumawati (2006:4) menyebutkan bahwa pengungkapan diduga dapat mengurangi *cost of capital* melalui pengurangan biaya pengumpulan informasi yang dilakukan oleh investor. Pengurangan biaya dapat meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi di perusahaan. Jika pengungkapan dilihat dalam sudut pandang ini, maka kinerja perusahaan termasuk profitabilitas akan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan. Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan akan memberikan informasi yang lebih luas dalam laporan keuangan tahunannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan Singhvi dan Desai (1971) yang dikutip Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007:92).

Koefisien regresi dari ROE mempunyai nilai negatif sebesar -0,011 menunjukkan hubungan yang tidak searah dengan luas pengungkapan. Arah hubungan negatif antara profitabilitas dengan pengungkapan sesuai dengan hasil penelitian Kusumawati (2006), Almilia (2008), dan Ariny (2010). Teori "*light and shadow management*" yang dikemukakan Jackson dan Carter (1995) menjelaskan secara implisit bahwa perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas akan cenderung mengungkapkan praktik *corporate governance* dalam laporan tahunan. Tujuan pengungkapan tersebut adalah untuk mengaburkan atau menutupi sesuatu hal yang dapat membuat nilai perusahaan buruk di mata investor atau pemangku kepentingan lainnya (Kusumawati, 2006:13).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Hipotesis Kelima

Pada tabel 1 terlihat bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hasil ini mendukung hipotesis penelitian kelima yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi (Jensen Meckling, 1976) dan penelitian terdahulu oleh Sembiring (2005) yang membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Tetapi, tidak konsisten dengan penelitian Rini (2010) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Koefisien regresi ukuran dewan komisaris bernilai positif. Arah hubungan ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Sembiring (2005) dan Rini (2010). Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada pihak manajemen dalam implementasi kebijakan direksi. Semakin besar ukuran dewan komisaris akan lebih mempermudah pengawasan. Tekanan terhadap manajemen semakin besar untuk melakukan pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

6.2. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diuji adalah ukuran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris.

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sutomo (2004), Andersson dan Daoud (2005), Kusumawati (2006), Rahmawati, Mutmainah dan Haryanto (2007), Bhuiyan dan Biswas (2007), Benardi K., Sutrisno, dan Assih (2009), Ariny (2010), Rini (2010) dan sejalan dengan teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) yang mana hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen.

Umur *listing* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yularto dan Chariri (2003). Arah hubungan yang ditunjukkan adalah negatif yang artinya dengan bertambahnya umur *listing* maka pengungkapan akan berkurang. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa perusahaan yang baru terdaftar di Bursa Efek Indonesia namun melakukan pengungkapan yang cukup luas. Hal ini yang menyebabkan variabel umur *listing*



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

mempunyai koefisien negatif. Jika dilihat dari jangka waktu operasi, perusahaan yang baru *listing* tersebut sudah beroperasi cukup lama dan sudah berpengalaman dalam melakukan pengungkapan sehingga pengungkapannya pun lebih luas. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan umur mulai beroperasinya perusahaan untuk diuji pengaruhnya terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Kepemilikan dispersi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Artinya semakin terdispersi struktur kepemilikan saham tidak menjamin adanya pengungkapan *corporate governance* yang luas. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Andersson dan Daoud (2005) dan Rini (2010).

Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007), Almilialia (2008), Bernardi K., Sutrisno, dan Assih (2009), Ariny (2010). Arah hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika perusahaan menghadapi penurunan dalam profitabilitasnya, maka pengungkapan *corporate governance* cenderung lebih luas untuk membuat perusahaan terlihat lebih baik dan mencoba untuk mengurangi tekanan pasar (Kusumawati, 2006).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Semakin meningkatnya ukuran dewan komisaris maka pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan akan bertambah luas. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi (Jensen Meckling, 1976) dan konsisten dengan penelitian Sembiring (2005).

7. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk merumuskan peraturan dan standar yang berkaitan dengan *corporate governance* di Indonesia. Misalnya: menambah ukuran dewan komisaris yang diwajibkan agar pengawasan dalam perusahaan menjadi lebih ketat dan pengungkapan yang dilakukan menjadi lebih luas. Di samping itu, berdasarkan hasil perhitungan, nilai rata-rata indeks pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan belum cukup tinggi. Hal ini merupakan tantangan bagi Bapepam untuk mendorong perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan yang lebih luas. Disamping itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate governance* bersama dengan variabel *corporate governance* dihargai oleh investor. Artinya, investor bersedia membayar dengan harga lebih tinggi untuk perusahaan yang mempraktikkan dan mengungkapkan *good corporate governance* dalam laporan tahunan.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Keterbatasan penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan hanya lima variabel. Dilihat dari nilai *adjusted R square* sebesar 0,521, berarti masih ada variabel lain yang dapat diteliti lebih lanjut, yaitu variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Objek yang digunakan dalam penelitian hanya meliputi perusahaan perbankan sehingga tidak bisa dijadikan generalisasi untuk seluruh perusahaan. Berdasarkan keterbatasan ini, peneliti selanjutnya dapat menggunakan perusahaan sektor lain sebagai objek penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar dan periode pengamatan yang lebih panjang agar hasil penelitian lebih kuat untuk melihat pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Di samping itu, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*, misalnya status auditor, status *listing*, tipe industri, dan lain-lain. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian langsung kepada perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pelaksanaan *corporate governance*.